

SEKOLAH PEREMPUAN: PRAKTIK SOSIAL AGEN PADA PEREMPUAN AKAR RUMPUT DESA KESAMBEN KULON

Hanifah Nurfadhilah¹, Rosnida Sari², Dodik Harnadi³

^{1,2,3} Universitas Jember

Corresponding author: rosnida.sari@unej.ac.id

ABSTRAK

Kasus feminisasi kemiskinan cukup banyak ditemukan di Desa Kesamben Kulon ketika sebelum adanya Sekolah Perempuan yang mana daerah ini merupakan daerah desa yang terpinggirkan. Perkawinan anak atau pernikahan dini adalah kasus yang mendominasi terjadi di desa tersebut. Ini terjadi karena beberapa faktor yang melatarbelakangi. Bentuk feminisasi kemiskinan lain juga dialami perempuan desa tersebut karena status mereka sebagai perempuan. Proses perjalanan berdirinya Sekolah Perempuan tidak terlepas dari adanya hambatan dan rintangan dari pihak yang tidak setuju dengan adanya Sekolah Perempuan. Meskipun begitu, seiring dengan berjalannya waktu, keberadaan Sekolah Perempuan mampu membawa perubahan yang cukup baik bagi perempuan akar rumput Desa kesamben Kulon. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan “Sekolah Perempuan” dalam praktik sosialnya berupaya menciptakan perubahan sosial bagi perempuan akar rumput di Desa Kesamben Kulon. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Data penelitian diperoleh melalui observasi non partisipatif, wawancara dan dokumentasi. Analisis penelitian menggunakan teori strukturasi oleh Anthony Giddens mengenai praktik – praktik sosial yang terjadi melalui dualitas struktur dalam relasi – relasi kekuasaan. LSM KPS2K sebagai agen utama Sekolah Perempuan melakukan praktik – praktik sosial dengan adanya pertemuan secara rutin. Relasi yang baik melalui dualitas struktur dipengaruhi oleh adanya 3 dimensi struktur yakni struktur signifikansi, struktur dominasi dan struktur legitimasi. Agen dengan kekuasaan yang dimilikinya mampu mempengaruhi pola pikir para perempuan akar rumput yang awalnya terkekang oleh budaya patriaki. Perubahan sosial yang terjadi pada anggota Sekolah Perempuan adalah pada pola pikir dan perilaku perempuan akar rumput di desa tersebut.

Kata kunci: *Feminisasi kemiskinan, sekolah perempuan, dualitas struktur*

ABSTRACT

Quite a lot of cases of the feminization of poverty were found in Kesamben Kulon Village before the existence of the Women's School, this area was a marginalized village area. Child marriage or early marriage is the case that dominates in this village. This happens because of several background factors. Another form of feminization poverty also occurs because of their status as women. The process of establishing a Women's School is inseparable from obstacles and obstacles from those who do not agree with the existence of a Women's School. However, over time, the existence of the Women's School was able to bring about quite good changes for the grassroots women of Kesamben Kulon Village. This research aims to find out and describe the "Women's School" in its social practices which seeks to create social change for grassroots women in Kesamben Kulon Village. The research type is qualitative research with a qualitative descriptive approach. Research data was obtained through non-participant observation, interviews and documentation. Research analysis uses structuration theory by Anthony Giddens regarding social practices that occur through the duality of structure in power relations. The NGO KPS2K as the main agent of the Women's School carries out social practices by holding regular meetings. Good relationships through duality of structure are influenced by the existence of 3 structural dimensions, namely the significance structure, the dominance structure and the legitimacy structure. Agents with the power they have are able to influence the mindset of grassroots women who were initially constrained by patriarchal culture. The social changes that occur among members of Women's School are in the mindset and behavior of grassroots women in the village.

Keywords: *Feminization Poverty, Women's Schools, Duality of Structure*

A. PENDAHULUAN

Negara Indonesia hingga saat ini masih menghadapi berbagai persoalan sosial yang belum juga tertuntaskan, salah satunya adalah feminisasi kemiskinan. Munculnya isu – isu feminisasi kemiskinan sendiri tidak terlepas dari adanya ketimpangan dan ketidakadilan gender yang selama ini dialami oleh para perempuan Indonesia. Berdasarkan pada laporan Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia pada tahun 2021, IPM perempuan sebesar 69,59 sedangkan IPM laki – laki sebesar 76,25 dengan rata – rata IPM adalah 72,29 (KemenPPPA, 2022). Dengan begitu dapat dikatakan bahwa masih rendahnya usaha dan upaya pemerintah dalam melakukan pembangunan terhadap perempuan. Jika angka IPM perempuan tidak segera ditingkatkan maka semakin rentan terjadi peningkatan kasus kemiskinan perempuan yang berkepanjangan.

Feminisasi kemiskinan merupakan isu krusial yang sampai sekarang masih banyak dialami

oleh para perempuan di Indonesia, utamanya bagi kaum perempuan marginal. Pemerintah telah lama memperhatikan isu tersebut, terbukti dengan adanya Instruksi Presiden (Inpres) No 9 Tahun 2000 tentang pengarusutamaan gender. Peraturan tersebut kemudian dicantumkan dalam Perpres No 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020 – 2024. Dalam RPJMN 2020 – 2024 tersebut, pada penjelasannya mengenai lingkungan dan isu strategis menyatakan bahwa bentuk – bentuk kesetaraan gender di Indonesia sampai sekarang masih belum sepenuhnya berjalan optimal, hal tersebut dikarenakan kelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) belum berjalan efektif. Dengan adanya RPJMN tersebut menjadi bukti bahwa pemerintah masih memiliki pekerjaan rumah pada masalah mengenai kesetaraan gender.

Perihal kemiskinan pada perempuan juga merupakan bagian dari tugas pemerintah untuk mengatasinya. Melalui program *SDGs*, pemerintah menargetkan sudah tidak ada lagi *extreme poverty* di tahun 2030 dan salah satu targetnya adalah perempuan (Zahrawati, 2020, p. 10). Melihat dari pernyataan tersebut, isu feminisasi kemiskinan sudah seharusnya menjadi perhatian penting untuk segera diatasi. Feminisasi kemiskinan bukanlah sebuah masalah yang bisa selesai hanya dengan melalui program pemberian bantuan secara materi, melainkan isu yang perlu diketahui lebih dalam akar penyebabnya. Perlu adanya kerja kolektif antara pemerintah dengan lembaga non pemerintah untuk mengentaskan isu feminisasi kemiskinan dan menciptakan perubahan bagi perempuan marginal yang lebih baik kedepannya. Dalam hal ini salah satu upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Gresik bersama Lembaga Swadaya Masyarakat Kelompok Perempuan dan Sumber – Sumber Kehidupan (LSM KPS2K Jawa Timur) yakni dengan melalui gerakan sosial berbasis komunitas bernama Sekolah Perempuan.

Desa Kesamben Kulon merupakan salah satu desa pinggiran kota yang berada di Kecamatan Wringinanom, Kabupaten Gresik. Jarak desa tersebut dengan pusat kota yakni sejauh \pm 50 km, jaraknya lebih jauh jika dibandingkan dengan jarak ke kabupaten yang berbatasan. Dengan lokasi desa yang berada di pinggiran kota atau perbatasan wilayah tersebut, sehingga pemerintah jarang memperhatikan kondisi sosial masyarakatnya. Berdasarkan laporan Pemetaan Partisipatif (PRA) LSM KPS2K pada tahun 2015, yang menjadi inti dari permasalahan perempuan Desa Kesamben Kulon adalah pendidikan rendah dan perkawinan anak. Laporan tersebut menunjukkan jumlah kasus pendidikan rendah perempuan sebanyak \pm 1.207 orang dan perkawinan anak sebanyak 85 orang. Tidak bisa dipungkiri bahwa permasalahan kemiskinan bermula dari pendidikan yang rendah, akhirnya menjadikan

kapasitas pengetahuan mereka minim akan pemahaman mengenai permasalahan feminisasi kemiskinan. Adanya kondisi perkembangan lambat pada perempuan desa dalam bentuk kemiskinan perempuan itulah yang menjadikan LSM KPS2K berupaya melakukan perubahan melalui Sekolah Perempuan. Pola pikir, budaya dan aturan yang masih terbelakang dalam kehidupan masyarakat desa menjadi faktor lahirnya kondisi tersebut.

Adanya Sekolah Perempuan di Desa Kesamben Kulon menjadi bentuk pemberdayaan pada perempuan akar rumput serta strategi untuk melakukan perubahan sosial masyarakat marginal yang lebih baik. Perubahan sosial pada perempuan Desa Kesamben Kulon, dilakukan oleh agen berawal dari membenahi pola pikir, mental dan memberikan penguatan pengetahuan melalui pendidikan non formal pada para perempuan desa. Seperti yang dikemukakan oleh (Zahrawati, 2020, p. 13) upaya yang dapat dilakukan untuk membebaskan perempuan dari jerat kemiskinan adalah melalui pendidikan.

Sekolah Perempuan menjadi wujud keterlibatan LSM KPS2K Jawa Timur dalam membantu percepatan pengarusutamaan gender (PUG) dengan melalui pendidikan seumur hidup bagi perempuan akar rumput di Desa Kesamben Kulon. Perubahan sosial yang terjadi pada perempuan akar rumput tidak terjadi secara langsung, akan tetapi melalui lintas ruang dan waktu yang cukup panjang. Berjalannya proses yang dilakukan oleh LSM KPS2K sebagai agen utama Sekolah Perempuan tidak terlepas dari berbagai hambatan dan rintangan untuk bisa mencapai tujuannya. Hal tersebut dikarenakan masyarakat telah memiliki aturannya sendiri dalam berkehidupan. Desa Kesamben Kulon merupakan wilayah pedesaan pinggiran kota dengan penduduknya yang mayoritas adalah Suku Jawa. Masyarakat Jawa sering diidentikkan dengan kentalnya budaya patriarki yang memposisikan derajat perempuan berada di bawah laki – laki. Mereka tidak menyadari bahwa budaya tersebut melekat pada kehidupannya, karena memang budaya itu diberikan dan dikonstruksikan pada mereka sejak lahir.

Akan tetapi seiring dengan berjalannya waktu berbagai proses kegiatan dan aktivitas di Sekolah Perempuan dapat diterima dengan baik oleh masyarakat dan perempuan lainnya, meskipun masih ada beberapa yang masih resisten. Adanya Sekolah Perempuan juga didukung oleh pemerintah desa dengan memberikan alokasi dana guna berjalannya kegiatan di Sekolah Perempuan. Selain itu, pada tahun 2017 Pemkab Gresik memberikan apresiasi terhadap Sekolah Perempuan dengan melakukan replikasi di 6 kecamatan lain di Kabupaten Gresik. Berdasarkan pada penjelasan tersebut, dalam tulisan ini penulis mencoba untuk mendeskripsikan praktik sosial dalam Sekolah Perempuan sebagai wadah perubahan sosial bagi perempuan akar rumput di pedesaan atau wilayah pinggiran. Analisa penelitian dilakukan

dengan menggunakan teori strukturasi untuk memberikan penjelasan mengenai praktik – praktik sosial dan konsep dualitas antara agen dengan struktur.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif guna memahami dan menggali informasi lebih dalam mengenai topik penelitian yang dilakukan. Menurut Creswell, dalam melakukan penelitian kualitatif penulis ingin memahami konteks atau lingkungan dari para partisipan yang ada dalam suatu studi penelitian (Creswell, 2015, p. 64). Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, dikarenakan penulis mengkaji dan mendeskripsikan fakta yang ada dalam Sekolah Perempuan Desa Kesamben Kulon, serta pada bentuk dari praktik – praktik sosial yang dilakukan oleh agen. Penelitian dilakukan pada Sekolah Perempuan yang berada di Desa Kesamben Kulon, Kecamatan Wringinanom, Kabupaten Gresik. Peneliti memilih Desa Kesamben Kulon dikarenakan desa tersebut merupakan desa pertama sasaran program Sekolah Perempuan yang dibentuk oleh LSM KPS2K dan keberadaannya masih aktif hingga sekarang, serta telah berproses sejak tahun 2013. Penentuan informan dilakukan melalui teknik *purposive sampling* dengan memberikan ketentuan pada informan yang akan dipilih. Pengumpulan data dilakukan dengan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan model teori Miles, Huberman dan Saldana yang melalui 3 tahap yakni, reduksi data, penyajian data dan menarik kesimpulan atau verifikasi. Dalam penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber dan triangulasi metode untuk menguji keabsahan data yang didapatkan oleh peneliti.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kondisi Perempuan Desa Kesamben Kulon Sebelum Adanya Sekolah Perempuan

Desa Kesamben Kulon merupakan desa pinggiran perkotaan yang cenderung terkesan lambat pada masyarakatnya, terlihat adanya struktur di desa tersebut yang berwujud pada perkembangan lambat pada perempuan desanya lebih khusus lagi kaum perempuan akar rumput. Situasi perkembangan lambat yang terjadi pada beberapa perempuan tersebut yakni berupa kondisi feminisasi kemiskinan, yang tergambar pada saat sebelum adanya Sekolah Perempuan di Desa Kesamben Kulon. Adanya fenomena perkawinan usia anak di desa tersebut menjadi salah satu pintu masuk dari permasalahan kemiskinan perempuan/feminisasi kemiskinan. Jumlah kasus perkawinan anak cukup banyak ditemukan di Desa Kesamben

Kulon yakni sebanyak 85 anak di tahun 2015, hal tersebut dikarenakan pada saat sebelum adanya Sekolah Perempuan, pemerintah desa masih lengah dalam penerapan kebijakannya terkait pengajuan izin pernikahan, dengan memberikan kemudahan izin untuk urusan pernikahan meskipun masih usia anak – anak. Adanya kasus perkawinan anak tersebut juga dilatarbelakangi oleh pola pemikiran masyarakatnya yang masih tertinggal dari kemajuan zaman sebagai akibat dari pendidikan formal yang rendah. Pola pikir masyarakat yang terbelakang seperti kepercayaan pada mitos mengenai perawan tua dan penafsiran agama yang disalahartikan. Terdapat berbagai bentuk feminisasi kemiskinan sebelum adanya Sekolah Perempuan. Sekolah ini berdiri sebagai akibat dari tingginya perkawinan usia anak. Berdasarkan pada data dari laporan pemetaan partisipatif (PRA) LSM KPS2K Jawa Timur di tahun 2015 ditemukan 5 kasus feminisasi kemiskinan dengan jumlah terbanyak yaitu perempuan upah rendah, kekerasan pada anak dan perempuan, perempuan putus sekolah, perempuan lansia, dan perempuan buta huruf.

Bentuk feminisasi kemiskinan lain berdasarkan pada hasil wawancara dengan para anggota Sekolah Perempuan, diantaranya, yaitu: kurangnya emansipasi perempuan di lingkungan pedesaan, rendahnya akses terhadap pendidikan, rendahnya akses perempuan terhadap pekerjaan, dan kurangnya kesempatan partisipasi perempuan di ruang publik (Bu Lilik, Bu Ivani, dan Bu Fitriya, 20 September 2023). Permasalahan lain dari kaum perempuan golongan akar rumput di Desa Kesamben Kulon yaitu mengalami keterasingan dalam kehidupannya dan tidak berdaya karena budaya patriarki yang mengontrol mobilisasi hidupnya, seperti apa yang dikatakan oleh salah satu anggota Sekolah Perempuan Desa Kesamben Kulon, yaitu Bu Fitriya.

“...perempuan kalau dulu itu memang biasanya di rumah aja nunggu suami datang, nanti kalau mau ke luar rumah harus izin dari suami dulu dan itupun belum tentu dibolehkan” (Bu Fitriya, 20 September 2023)

Pernyataan lainnya mengenai feminisasi kemiskinan dalam hal rendahnya kesempatan perempuan akar rumput dalam kegiatan organisasi desa dan kegiatan musrenbang juga disampaikan oleh anggota Sekolah Perempuan lainnya yaitu Bu Lilik. Jumlah perempuan Desa Kesamben Kulon yang ikut berpartisipasi dalam forum publik hanya sebanyak 49 orang. Perempuan akar rumput Desa Kesamben Kulon dengan pendidikan dan kondisi sosial ekonominya yang rendah, hanya dianggap sosok yang lemah. Di dalam lingkungan desa tersebut hanya perempuan tertentu saja yang memiliki akses untuk bisa terlibat dalam aktivitas penting di desa dan keorganisasian desa seperti PKK dan kader posyandu. Seperti yang ditegaskan oleh Bu Ifani.

“Dulu ya mereka ga pernah keluar rumah, ga pernah ikut organisasi, mungkin ada perempuan yang aktif keluar rumah tapi itu mereka yang tergabung di organisasi seperti fatayat, PKK, jamiyah dan kebanyakan itu dari ibu – ibu istri pemerintah desa, kalau perempuan seperti saya dan teman – teman Sekolah Perempuan yang lain cuma sebagai ibu rumah tangga yang nurut perintah suami dan jarang keluar rumah, jadi akhirnya kurang tahu informasi apapun” (Bu Ifani, 20 September 2023)

Menurut *International Labour Organization (ILO)* dalam (Zahrawati, 2020, p. 12) menyatakan bahwa sosok perempuan yang miskin merasakan penderitaan yang lebih, karena pada sebagian kehidupan masyarakat, perempuan menjadi subjek dari nilai – nilai sosial yang membatasi mereka dalam meningkatkan kondisi ekonomi dan pada beberapa akses pelayanan umum.

Adanya bentuk kemiskinan pada perempuan di Desa Kesamben Kulon juga disebabkan oleh faktor internal dan faktor eksternal. Pada faktor internal yakni yang berasal dari diri perempuan itu sendiri karena keterbatasan dan ketidakmampuannya memberdayakan diri, seperti kecacatan, diceraiakan oleh suami, kematian suami dan aspek kemiskinan ekonomi yang diwariskan. Hal tersebut dapat ditunjukkan dari adanya 189 kepala keluarga perempuan dan sebanyak 20 perempuan difabel. Pada kehidupan ekonomi, berdasarkan data Kecamatan Wringinanom (BPS, 2014, p. 41) didominasi oleh keluarga sejahtera tingkat III sejumlah 504 KK dan keluarga pra sejahtera sejumlah 264 KK, kurangnya potensi pertanian karena curah hujan yang rendah menjadikan hasil pertanian kurang produktif tidak seperti pada daerah dataran tinggi. Sebagian lainnya bekerja sebagai buruh pabrik swasta sebanyak 1.665 orang dan petani/pekebun sebanyak 1.629 orang, meskipun begitu pendapatan yang diperoleh juga masih dirasa kurang untuk memenuhi kebutuhan sehari – hari. Beberapa perempuan di desa tersebut hanyalah sebagai ibu rumah tangga yang mengurus kegiatan rumah tangga, beberapa lainnya bekerja menjadi buruh pabrik untuk menambah pemasukan keluarga.

Sedangkan pada faktor eksternal yaitu diakibatkan karena di luar kondisi perempuan itu sendiri, seperti pada aspek sosial dan budayanya. Pada aspek sosial dan budaya, masyarakat Desa Kesamben Kulon didominasi oleh penduduk suku Jawa dengan beberapa penduduknya yang masih berpola pikir patriarki. Masih ditemukan kasus putus sekolah yang berakibat pada pendidikan rendah sehingga menjadikan pola pikir dan wawasan masyarakat kurang terbuka mengenai kemajuan pengetahuan. Sebuah data mengatakan bahwa perempuan di desa tersebut yang mengalami putus sekolah sebanyak 870 orang dan perempuan buta huruf sebanyak 337 orang (KPS2K, 2015). Selain itu juga ditemukan diskriminasi perempuan, ketidakadilan gender dan pengkotakan gender pada ranah publik, terutama pada para perempuan akar rumput.

Pernyataan situasi dan kondisi di atas adalah gambaran kehidupan sosial masyarakat Desa Kesamben Kulon, terutama pada kaum perempuan akar rumput pada saat sebelum adanya Sekolah Perempuan. Kondisi perkembangan lambat tersebutlah yang menjadikan LSM KPS2K sebagai agen tergerak untuk menciptakan perubahan sosial bagi para perempuan akar rumput di Desa Kesamben Kulon melalui Sekolah Perempuan. Kondisi tersebut bagi agen tidak dapat dibiarkan terus menerus terjadi, karena perubahan harus diwujudkan untuk dapat mensejahterahkan kehidupan banyak kaum, terutama kaum perempuan akar rumput yang sering mengalami ketertindasan dan ketertinggalan.

2. Sejarah Sekolah Perempuan Desa Kesamben Kulon

Sekolah Perempuan merupakan gerakan sosial berbasis komunitas yang berupaya untuk memberdayakan kaum perempuan akar rumput pedesaan melalui pendidikan alternatif. Sekolah Perempuan ini awalnya diinisiasi oleh (Lingkaran Pendidikan Alternatif Untuk Perempuan (KAPAL Perempuan) sebagai bentuk kerja dari program *Gender Watch*. Latar belakang dari adanya Sekolah Perempuan ini yaitu pertama, menjadi visi bersama KAPAL Perempuan dengan mitranya untuk membangun dan mengembangkan kesadaran kritis di kalangan masyarakat khususnya perempuan marginal/akar rumput. Kedua, adanya isu krusial secara global di Indonesia yang sampai saat ini masih terjadi yaitu feminisasi kemiskinan yang disebabkan oleh faktor rendahnya kondisi ekonomi serta kebijakan pemerintah yang belum mampu menyelesaikan isu perempuan dan kemiskinan masyarakat.

Gerakan ini tersebar di 6 provinsi lainnya di Indonesia melalui mitra – mitra yang ada di berbagai provinsi, salah satunya di Jawa Timur. Sekolah Perempuan di Desa Kesamben Kulon ini dibentuk pada tahun 2013 melalui mitranya di Jawa Timur yakni LSM KPS2K Jawa Timur. Sekolah Perempuan di desa ini berkarakteristik sebagai Sekolah Perempuan wilayah pedesaan pinggiran kota dengan sasaran perempuan – perempuan dari golongan akar rumput. Pemilihan Desa Kesamben Kulon sebagai desa awal dibentuknya Sekolah Perempuan di Kabupaten Gresik, karena adanya kasus perkawinan yang tinggi dan angka kemiskinan di desa tersebut lebih tinggi jika dibandingkan dengan desa lainnya.

Terbentuknya Sekolah Perempuan Desa Kesamben Kulon dimulai dari mendatangi salah satu rumah warga yang kini menjadi koordinator Sekolah Perempuan Desa Kesamben Kulon bernama Bu Ifani. Kedatangan tersebut disambut baik karena pada saat itu staff KPS2K melakukan penyamaran dengan menjadi sales panci yang menawarkan sebuah produk alat masak. Dari penyamaran tersebut, staff mulai berpura – pura menawarkan produk dan sesekali

bertanya mengenai Bu Ifani dan mengenai. Pada saat pertanyaan yang disampaikan tidak berkaitan dengan penawaran produk, Bu Ifani merasa curiga dan bingung, lalu staff tersebut menjelaskan maksud sebenarnya dan mengajak Bu Ifani untuk ikut membantu berdirinya Sekolah Perempuan. Namun ajakan tersebut tidak langsung diterima oleh Bu Ifani meskipun sebenarnya dirinya ingin menerima ajakan tersebut, akan tetapi ada sosok suami yang harus diberitahunya terlebih dahulu mengenai hal tersebut. Setelah membujuk suaminya, Bu Ifani diperbolehkan untuk ikut kegiatan tersebut meski suaminya sedikit merasa jengkel, karena istrinya menjadi sering datang ke balai desa.

Pernyataan tersebut jelas menunjukkan bahwa perempuan di Desa Kesamben Kulon masih terkekang oleh budaya patriarki dari suaminya yang mengatur mobilitas hidup seorang istri. Bu Ifani menjadi salah satu perempuan pertama di Desa Kesamben Kulon yang ikut bergabung di Sekolah Perempuan, lalu dirinya mengajak beberapa perempuan lain untuk juga ikut bergabung dan pada saat itu dirinya dapat mengajak sebanyak 34 perempuan dari berbagai dusun. Setelah terkumpul para anggota Sekolah Perempuan dari dusun – dusun yang lainnya, kemudian mereka bersama dengan tim KPS2K serta tim lainnya yang telah dibentuk, melakukan pemetaan partisipatif terkait permasalahan – permasalahan yang ada di Desa Kesamben Kulon utamanya kasus yang menimpa pada perempuan. Setelah proses pemetaan partisipatif telah dilaksanakan dan ditemukan kasus – kasus permasalahan pada perempuan, baru dimulailah kegiatan pembelajaran Sekolah Perempuan yang mengacu pada modul Pendidikan Adil Gender (PAG).

Dalam berbagai proses persiapan pembentukan hingga pelaksanaan Sekolah Perempuan di Desa Kesamben Kulon, tidak terlepas dari adanya hambatan dan tantangan bagi LSM KPS2K sebagai agen yang mengawali. Selama proses berjalannya gerakan komunitas Sekolah Perempuan ini selalu mendapat kecaman dari pihak yang kurang mendukung, baik dari warga maupun beberapa pemerintah desa yang kontra. Komunitas ini selalu dianggap sebagai kegiatan yang membawa pengaruh buruk bagi para perempuan desa, mengajarkan berani kepada suami, dan bahkan dituduh sebagai ajaran yang sesat. Pemahaman yang salah mengenai Sekolah Perempuan menjadi kendala tersendiri bagi agen untuk tetap terus berjalan. Di sisi lain, agen harus menyadari bahwa budaya patriarki di Desa Kesamben Kulon cukup mengakar kuat dalam kehidupan masyarakatnya. Bahkan sampai sekarang, berbagai bentuk penolakan tersebut masih muncul tetapi tidak sebesar pada waktu awal adanya Sekolah Perempuan, sebagaimana yang disampaikan oleh Bu Iva pada saat wawancara dengan peneliti.

“Sampai sekarang juga masih ada penolakan tapi sudah tidak sevelgar atau seekstrem yang dulu, jadi pemerintah desa sana itu beberapa ada yang masih resistance tapi ga sevelgar atau seekstrem dulu” (Bu Iva, 6 Oktober 2023)

Untuk menghadapi polemik dan hambatan yang ada, agen terus berusaha memberikan pemahaman dan mengajak mereka yang kontra untuk mengikuti kegiatan di Sekolah Perempuan supaya mereka bisa memahami tujuan dari agen. Tidak hanya itu, agen juga melakukan upaya lain untuk mengatasi permasalahan yang timbul yakni dengan mengangkat beberapa anggota Sekolah Perempuan untuk menjadi *leader*. Mereka yang ditunjuk sebagai *leader* ini adalah anggota yang memiliki sikap loyal pada agen dan keinginan yang tinggi untuk mengubah dirinya menjadi lebih baik. Terdapat 10 orang *leader* yang ditunjuk oleh agen. Para *leader* tersebutlah yang membantu mengurai polemik yang terjadi pada agen dan menjembatani agen untuk menjangkau masa/anggota lebih banyak dengan begitu dapat diakui bahwa para *leader* ini juga bagian dari agen di Sekolah Perempuan.

Pada awalnya kegiatan – kegiatan yang diadakan oleh agen tidak lantas selalu dihadiri oleh seluruh anggota Sekolah Perempuan Desa Kesamben Kulon secara lengkap, melainkan juga mengalami pasang surut dan kejenuhan yang dirasakan dari para anggotanya. Akan tetapi, LSM KPS2K sebagai agen senantiasa mencoba untuk mengevaluasi dan menata ulang kegiatan yang dijalankannya supaya pertemuan – pertemuan tersebut berjalan dengan efektif. Lantas hal tersebut tidak menjadikan agen untuk menyerah, justru semakin berusaha sebaik mungkin sembari mencari solusinya.

Keberadaan dari Sekolah Perempuan di Desa Kesamben Kulon diakui oleh Pemerintah Kabupaten Gresik dengan adanya penandatanganan *Memorandum of Understanding (MoU)* pada tahun 2014 lalu bersama dengan Bapak Bupati Sambari Halim yang mengacu pada Perda No. 4 tahun 2012 tentang pengarusutamaan gender dalam pembangunan daerah (Shofiyyahtusya’diah & Rahaju, 2022, p. 719). Melalui nota kesepahaman tersebut, sehingga menjadikan Sekolah Perempuan memiliki landasan hukum dalam pelaksanaan kegiatannya. Pada 2016 pemerintah kabupaten menindaklanjuti komunitas Sekolah Perempuan ini dengan memuatnya ke dalam RPJMD Kabupaten Gresik dan melakukan replikasi Sekolah Perempuan di beberapa kecamatan lainnya dengan diberi nama “Sekoper”.

3. Praktik – Praktik Sosial dalam Sekolah Perempuan

LSM KPS2K dalam upayanya tersebut, bermula dari praktik – praktik sosial yang dilakukan di Sekolah Perempuan. Praktik sosial dilakukan secara terus menerus melintasi

ruang dan waktu yang panjang untuk dapat mempengaruhi struktur dan memberikan perubahan yang cukup baik pada diri individu perempuan di sana. Struktur dalam penelitian ini adalah adanya kondisi perkembangan lambat para perempuan akar rumput yang dipengaruhi oleh masyarakat Desa Kesamben Kulon elemen norma, kebijakan, nilai, budaya dan pola pikirnya. Menurut teori strukturasi, domain dasar kajian ilmu – ilmu sosial bukanlah pengalaman masing – masing aktor ataupun keberadaan setiap bentuk totalitas kemasyarakatan, melainkan praktik – praktik sosial yang terjadi sepanjang ruang dan waktu (Giddens, 2010, p. 3). Dalam hal ini, agen Sekolah Perempuan yakni LSM KPS2K mewujudkan praktik – praktik sosial tersebut ke dalam berbagai perjumpaan secara rutin dengan para anggota Sekolah Perempuan, diantaranya:

a. Pembelajaran Pendidikan Adil Gender (PAG)

Pada awal berdirinya Sekolah Perempuan, proses pembelajaran dilakukan hampir setiap hari, dikarenakan para agen melakukan *live in* di Desa Kesamben Kulon selama \pm 5 tahun lamanya mulai 2013 – 2018. Metode *live in* dilakukan sebagai strategi pendekatan pada masyarakat dan mengamati secara langsung keseharian masyarakat di Desa Kesamben Kulon terutama para perempuannya, selain itu juga untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap upaya yang dijalankan agen. Ketika di tahun 2018 sampai saat ini pembelajaran dilakukan setiap bulan karena modul PAG yang disusun oleh KAPAL Perempuan telah selesai dipelajari, namun bagi LSM KPS2K penting untuk mengulang kembali pembelajaran tersebut dan memonitoring pemahaman para anggota Sekolah Perempuan mengenai konsep adil gender. Monitoring dilakukan dengan cara memberikan beberapa pertanyaan terkait materi yang pernah diberikan. Pertanyaan dengan metode permainan/*game* juga biasanya dilakukan agen supaya tidak terasa membosankan.

Monitoring dilakukan dengan tujuan untuk memastikan bahwa pembelajaran yang diberikan oleh para agen dapat diterima dan memberikan pengaruh terhadap pemikiran para anggota Sekolah Perempuan. Pembelajaran materi yang disampaikan oleh LSM KPS2K berdasarkan pada modul Pendidikan Adil Gender (PAG) yang didalamnya berisikan materi mengenai pengetahuan kritis pada para perempuan akar rumput pedesaan. Saat ini proses pembelajaran dalam Sekolah Perempuan di Desa Kesamben Kulon tidak lagi menggunakan modul kelas *advanced* yaitu modul tematik. Selain pembelajaran yang berdasar pada modul, kegiatan pembelajaran lain juga seringkali dilakukan oleh agen untuk memperluas pengetahuan lain bagi para anggota Sekolah Perempuan. Pembelajaran tersebut salah satunya

seperti yang pernah dilakukan yaitu Pendidikan Kecakapan Hidup Perempuan pada bidang pertanian dengan pemanfaatan lahan pekarangan.

b. Pelatihan Peningkatan Kapasitas Perempuan Pedesaan

Praktik sosial lainnya yaitu dengan melalui berbagai pelatihan. Pelatihan tersebut tidak hanya dilakukan oleh LSM KPS2K sebagai agen, akan tetapi sering kali bersama dengan multipihak Sekolah Perempuan untuk turut serta membantu kegiatan pelatihan yang diadakan. Dengan melalui pelatihan diharapkan mampu meningkatkan kapasitas para anggota Sekolah Perempuan setelah mendapatkan pembelajaran materi yang disampaikan agen. Setiap satu bulan sekali agen melakukan kegiatan pelatihan, baik dari LSM KPS2K itu sendiri ataupun pelatihan dari multipihak Sekolah Perempuan. Terdapat beberapa kegiatan pelatihan yang akhir – akhir ini diadakan oleh LSM KPS2K, diantaranya:

a. Pelatihan Fasilitator Komunitas Peningkatan Kapasitas Kepemimpinan Perempuan dan Perlindungan Sosial

Pelatihan tersebut dilakukan bekerjasama dengan Dinas KBPPA Kabupaten Gresik dengan tujuan untuk memperkuat pemahaman keadilan gender, memahami berbagai bentuk perlindungan sosial perempuan, memberikan pemahaman mengenai kepemimpinan perempuan, pengorganisasian perempuan untuk bisa memperjuangkan hak – haknya dan bersama Sekolah Perempuan menyusun rancangan kegiatan. Kegiatan yang dilakukan di luar kota tersebut juga bertujuan untuk mempererat kekompakan agen dengan para anggota Sekolah Perempuan beserta multipihak yang mendukung gerakan komunitas tersebut.

b. Pelatihan Pendamping Korban Kekerasan Berbasis Gender

Kegiatan ini dilakukan oleh LSM KPS2K dalam rangka meningkatkan pemahaman para anggota Sekolah Perempuan mengenai peran dari “Pos Pengaduan Sekolah Perempuan” dalam mendampingi korban kekerasan berbasis gender. Selain itu, juga bertujuan untuk memberikan pemahaman mengenai alur proses hukum ketika menangani kasus kekerasan yang harus difahami oleh para anggota Sekolah Perempuan, terutama para *leader* Sekolah Perempuan. Adanya pelatihan tersebut juga berupaya untuk mendorong semangat para anggota Sekolah Perempuan dalam menyelesaikan kasus – kasus yang dialami oleh para perempuan di Desa Kesamben Kulon.

c. Pelatihan Advokasi Berperspektif Gender dan Inklusi Sekolah Perempuan

Kegiatan pelatihan lainnya adalah pelatihan yang ditujukan bagi para anggota Sekolah Perempuan di Desa Kesamben Kulon yaitu pelatihan advokasi dan inklusi. Tujuan dari adanya pelatihan tersebut adalah supaya para anggota memiliki kemampuan untuk bisa melakukan advokasi dalam upayanya memperjuangkan kepentingan kelompok perempuan, disabilitas, lansia dan kelompok rentan. Melalui advokasi ini diharapkan mampu mempengaruhi dan mengubah pola pikir dan cara pandang hidup para anggota Sekolah Perempuan, agar tertanam pengetahuan yang baik terhadap hidupnya. Sehingga ketika para anggota Sekolah Perempuan melakukan kegiatan advokasi pada pemerintah desa, kabupaten maupun advokasi ke jalan mereka memiliki kepercayaan diri dalam aksinya.

c. Penguatan Advokasi Perempuan

Sekolah Perempuan merupakan sebuah gerakan yang berbasis komunitas ini juga memiliki kegiatan praktik advokasi. LSM KPS2K selalu berupaya untuk memberikan pengajaran pada para anggota Sekolah Perempuan melalui kegiatan advokasi dan penguatan advokasi, sebagai bentuk praktik dari pembelajaran yang telah didapatkan. Advokasi yang dilakukan Sekolah Perempuan bertujuan untuk memperjuangkan kepentingan dan kebutuhan yang menjadi hak dari para perempuan Desa Kesamben Kulon. Selain itu, advokasi dilakukan untuk menyuarakan suara ketertindasan yang selama ini dirasakan oleh mereka sebagai kaum perempuan yang terpinggirkan. Praktik sosial advokasi dilakukan melalui berbagai kegiatan seperti diantaranya:

a. Advokasi Sekolah Perempuan terhadap Pendanaan Komunitas Melalui Dana Desa Kesamben Kulon

Para elemen Sekolah Perempuan pernah melakukan kegiatan advokasi kepada Pemerintah Desa Kesamben Kulon terkait pendanaan kegiatan Sekolah Perempuan. Advokasi tersebut bertujuan untuk dapat mengakses dana desa pada aspek pemberdayaan masyarakat desa, karena pada saat itu dana desa lebih besar dikeluarkan untuk kepentingan pembangunan dan perbaikan fisik desa. Agen berupaya membantu para anggota Sekolah Perempuan untuk melakukan advokasi tersebut dan sampailah mereka memperoleh dana desa guna keberlanjutan komunitas Sekolah Perempuan, seperti apa yang dituturkan oleh Koordinator Program LSM KPS2K, yaitu Mbak Sinta:

“...karena Sekolah Perempuan bukan termasuk program yang selesai dalam waktu cepat, tapi visinya kita program ini bisa berjalan panjang terus dengan membawa perubahan di masyarakat desa melalui pendanaan dana desa untuk seterusnya, karena dana desa kan memang ada haknya untuk pemberdayaan, nah akhirnya Sekolah Perempuan melakukan advokasi ke Pemerintah Desa sehingga bisa dapat pendanaan dari dana desa” (Mbak Sinta, 15 Agustus 2023)

b. Advokasi melalui kegiatan peringatan Hari Perempuan Internasional

Peringatan Hari Perempuan Internasional adalah momen yang sering dirayakan setiap tahunnya oleh agen bersama anggota Sekolah Perempuan untuk melakukan advokasi. Seperti yang pernah dilakukan pada bulan Maret tahun 2023 lalu, advokasi dilakukan dengan mereka berjalan sejauh 2,5 km dengan mengenakan baju adat menuju pendopo Bupati Gresik. Sesampainya di depan pendopo mereka melakukan advokasi mengenai upaya pemerintah untuk dapat peduli terhadap isu – isu perempuan.

Gambar 1. Advokasi di Hari Perempuan Internasional



Sumber: Dokumentasi Peneliti, 8 Maret 2023

c. Advokasi melalui peringatan Hari Kemerdekaan Indonesia

Momen peringatan lainnya yang juga selalu diperingati oleh Sekolah Perempuan sekaligus sebagai wadah untuk melakukan advokasi adalah Peringatan Hari Kemerdekaan Indonesia. Kegiatan dilakukan dengan upacara di tengah – tengah lapangan terbuka. Pemilihan lokasi untuk kegiatan ini biasanya dilakukan di 2 kabupaten yakni Kabupaten Gresik dan Kabupaten Lumajang. Seperti salah satunya yang pada tahun ini diadakan oleh Sekolah Perempuan adalah peringatan HUT Kemerdekaan RI yang bertempat di Kabupaten Lumajang. Peserta dari kegiatan advokasi tersebut adalah para anggota Sekolah Perempuan dari Kabupaten Gresik dan

Kabupaten Lumajang yang diberi nama “Festival Kepemimpinan Perempuan”. Tidak hanya upacara, selanjutnya mereka juga melakukan Pawai Budaya Inklusi sejauh 3 km dengan menyampaikan berbagai seruan kemerdekaan dari perempuan pinggiran.

Secara keseluruhan bentuk praktik – praktik sosial yang dilakukan secara berulang – ulang oleh LSM KPS2K adalah pembelajaran, pelatihan dan pengadvokasian. Kegiatan yang dilakukan secara perlahan memberi perubahan sosial yang cukup baik bagi para perempuan akar rumput di Desa Kesamben Kulon. Perubahan tersebut terlihat pada pola pikir para anggota Sekolah Perempuan dan perilaku mereka yang tidak lagi mudah dikendalikan oleh budaya patriarki. Perubahan secara kolektif, terlihat dari adanya kesadaran dari para anggota sekolah untuk peduli pada isu – isu perempuan yang ada di desanya, yang awalnya mereka acuh tak acuh terhadap hal tersebut. Melalui adanya Pos Pengaduan Sekolah Perempuan, para *leader* Sekolah Perempuan membantu menyelesaikan permasalahan yang dialami oleh para perempuan lainnya. Secara sosial, sebelum adanya Sekolah Perempuan, mereka hanyalah sosok perempuan marginal yang tidak memiliki pengetahuan apapun karena memang pendidikan mereka yang rendah, kini mereka disegani dan dihargai oleh masyarakat desa karena mempunyai berbagai ilmu dan pengalaman dari Sekolah Perempuan. Para anggota Sekolah Perempuan kini juga diikutsertakan dalam kegiatan musrenbang di tingkat desa maupun kabupaten yang berkaitan dengan rencana pemberdayaan perempuan. Berbagai penghargaan juga diraih oleh Pemerintah Kabupaten Gresik atas adanya komunitas Sekolah Perempuan seperti, (1) Penghargaan Anugerah Parahita Ekapraya (APE) pada tahun 2016 dalam kategori madya. (2) Penghargaan *Innovative Government Awards (IGA)* pada tahun 2017 dan (3) Penghargaan Otonomi Awards tahun 2018, yang mana 2 dari ketiga penghargaan tersebut diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri Indonesia.

4. Dualitas Antara Agen dan Struktur dalam Sekolah Perempuan

Dalam proses berjalannya Sekolah Perempuan yang berupaya membawa perubahan sosial tidak terlepas dari adanya dualitas antara agen dan struktur yang saling terjalin dengan cukup baik. Relasi yang terjalin antara agen dan struktur menunjukkan bahwa peran dari keduanya yang menentukan adanya perubahan. Begitu juga halnya dengan Sekolah Perempuan dalam menciptakan perubahan sosial bagi perempuan akar rumput Desa Kesamben Kulon. LSM KPS2K dan para *leader* Sekolah Perempuan, keduanya adalah agen yang berupaya membangun relasi dualitas yang baik untuk dapat menciptakan perubahan bagi para perempuan akar rumput Desa Kesamben Kulon.

Peran dari agen begitu penting dalam mengawali sebuah perubahan bagi para perempuan akar rumput Desa Kesamben Kulon dengan melihat adanya kondisi perkembangan lambat yang ada. Untuk mewujudkan perubahan yang diharapkan oleh agen, perlu adanya praktik – praktik sosial melalui ruang dan waktu yang cukup lama. Upaya tersebut dilakukan oleh agen melalui tindakan – tindakan intervensinya pada para perempuan akar rumput dan mempengaruhi pola pikir mereka yang masih terkekang oleh budaya patriarki. Selama berjalannya gerakan sosial berbasis komunitas ini terbentuk melalui adanya dualitas struktur yang dipengaruhi oleh relasi – relasi kekuasaan di dalamnya. Menurut Giddes dalam (Ritzer, 2012, p. 889) dualitas antara agen dan struktur tidak dapat terpisahkan di dalam praktik – praktik sosial yang berkelanjutan.

Dalam struktur dominasi melekat pada LSM KPS2K sebagai agen utama dan juga para *leader* sebagai agen pemicu yang mengawali perubahan melalui Sekolah Perempuan. Agen utama sebagai organisasi kemasyarakatan yang bergerak pada isu – isu perempuan sejak tahun 2004 telah memiliki jaringan yang luas dan berbagai pengalaman dalam melakukan aksi pemberdayaan kaum marginal. Di sisi lain, agen dengan kekuasaannya tersebut juga berusaha untuk mempengaruhi elemen pemerintahan supaya mendukung adanya Sekolah Perempuan. Advokasi dan konsolidasi sebagai jalan yang ditempuh kedua agen untuk mencapai tujuan mereka, dengan begitu pihak pemerintah yang mendukung dianggap sebagai multipihak bagi Sekolah Perempuan hingga sekarang. Akan tetapi, meskipun agen utama telah memiliki dominasi kekuasaan yang cukup besar, tetap saja memiliki kendala dan hambatan yang cukup berarti dalam prosesnya. Adanya pihak yang kontra dan terus melakukan resistensi terhadap Sekolah Perempuan, menjadikan agen utama cukup sulit untuk mendapatkan kepercayaan dari masyarakat.

Maka dari itu, agen dalam pendekatannya melibatkan para anggota yang telah lama berkecimpung di Sekolah Perempuan yang disebut sebagai *leader* Sekolah Perempuan. Agen melibatkan para *leader* Sekolah Perempuan untuk turut serta membantu agen dalam upayanya menciptakan perubahan yakni dengan melalui adanya pos pengaduan yang dikelola oleh para *leader* Sekolah Perempuan. Pelibatan tersebut bertujuan untuk memudahkan agen mempengaruhi perempuan akar rumput lainnya supaya bergabung di Sekolah Perempuan. Sehingga sejak saat itu para *leader* Sekolah Perempuan juga diakui sebagai agen perubahan bagi para perempuan di desanya atau lebih tepatnya agen pemicu perubahan yang mendukung usaha dari LSM KPS2K sebagai agen utama. Para *leader* ikut serta dengan mengambil peran pada saat mereka telah mendapat wawasan dan pelatihan yang luas dari agen utama, mereka mendukung dan mengiringi setiap pergerakan yang dilakukan oleh LSM KPS2K.

Selanjutnya dalam struktur signifikansi, agen dengan penguasaannya terkait pengetahuan – pengetahuan kritis gender dan adanya kemampuan mengkoordinasikan para anggota Sekolah Perempuan berusaha untuk menciptakan sebuah gerakan sosial yang bersifat kolektif. Agen menggunakan kemampuannya menguasai sebuah pengetahuan sebagai kekuatan mereka untuk mereproduksi sistem sosial yang sudah ada. Terdapat nilai – nilai pemahaman adil gender yang diterapkan ke dalam praktik – praktik sosial secara berulang diantaranya, pembelajaran materi secara informal, pelatihan – pelatihan peningkatan kapasitas perempuan dan advokasi terhadap isu – isu feminisasi kemiskinan. Pembelajaran pendidikan adil gender yang dilakukan dalam Sekolah Perempuan mencoba untuk mentransfer nilai – nilai pemahaman yang benar mengenai gender, konsep gender yang seharusnya dijalankan dan kepemimpinan perempuan. Pada awalnya para anggota Sekolah Perempuan yang saat ini sudah menjadi *leader* atau agen pemicu dengan motivasi tidak sadarnya, mereka mulanya hanya penasaran ketika bergabung di Sekolah Perempuan. Setelah mengikuti proses belajar dengan kesadaran diskursifnya, beberapa dari mereka memiliki keinginan yang sama dengan agen untuk mengubah kondisi sosial dari desa yang ditinggalinya. Para *leader* tersadar untuk mendukung upaya – upaya perubahan yang dilakukan oleh agen utama. Dalam kesadaran praktisnya, LSM KPS2K secara rutin melakukan berbagai praktik – praktik sosialnya sebagai bentuk rutinitas yang dilakukan oleh agen.

Terakhir yaitu adanya struktur legitimasi yang merupakan pembenaran oleh struktur dalam hal ini adalah para perempuan anggota sekolah terhadap apa yang dilakukan agen. Pengakuan atau pembenaran tersebut tidak hanya dilakukan oleh para anggota Sekolah Perempuan, akan tetapi masyarakat lain di Desa Kesamben Kulon yang merasakan kebaikan dan manfaat dari adanya komunitas Sekolah Perempuan. Pengakuan lainnya juga diberikan pemerintah dengan melalui adanya pemberian Nota Kesepahaman, sehingga Sekolah Perempuan mendapatkan legalitas secara hukum dalam pelaksanaannya.

D. KESIMPULAN

Perubahan sosial yang ada pada perempuan akar rumput Desa Kesamben Kulon terjadi karena adanya LSM KPS2K sebagai agen utama dari Sekolah Perempuan Desa Kesamben Kulon. Para *leader* Sekolah Perempuan juga menjadi agen pendamping bagi perubahan sosial perempuan akar rumput/anggota Sekolah Perempuan lainnya. Mereka bersama – sama membuat gagasan dan upaya perubahan agar semakin banyak perempuan lain di Desa Kesamben Kulon yang sadar akan gender dan memperbaiki hidupnya. Bentuk praktik sosial

yang dilakukan LSM KPS2K sebagai agen utama Sekolah Perempuan secara keseluruhan adalah pembelajaran materi, pelatihan – pelatihan dan pengadvokasian. Terbentuknya perubahan sosial yang ada pada saat ini, tidak terlepas dari usaha dan upaya yang terjalin dengan baik antara agen dan struktur. Dualitas struktur tersebut dipengaruhi oleh 3 dimensi struktur yaitu, struktur signifikasi, struktur dominasi dan struktur legitimasi. Sekolah Perempuan di Desa Kesamben Kulon dinilai sebagai bentuk usaha yang baik dalam isu feminisasi kemiskinan di wilayah pedesaan atau pinggiran dan mendapat pengakuan dari pemerintah kabupaten hingga mendapatkan berbagai penghargaan.

E. DAFTAR PUSTAKA

- BPS. (2014). Kecamatan Wringinanom Dalam Angka 2014. BPS Kabupaten Gresik.
- Creswell, J. W. (2015). *Penelitian Kualitatif dan Desain Riset, Memilih di antara Lima Pendekatan (Ke-3)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Giddens, A. (2010). *The Constitution of Society: Outline of Theory of Structuration*, diterjemahkan oleh Mautur dan Daryanto dengan judul *Teori Strukturasi: Dasar—Dasar Pembentukan Struktur Sosial Masyarakat*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- KemenPPPA. (2022). Pembangunan Manusia Berbasis Gender Tahun 2022. KemenPPPA.
- KPS2K. (2015). *Laporan Pemetaan Partisipatif Desa Kesamben Kulon Kec. Wringinanom Kab. Gresik Prov. Jawa Timur*. KPS2K Jawa Timur
- Shofiyah, M., & Rahaju, T. (2022). *Implementasi Program Pemberdayaan Perempuan Melalui Sekolah Perempuan (Sekoper) di Desa Kramat Inggil Kabupaten Gresik*. 10(3), 711–724.
- Ritzer, George. 2012. *Sociological Theory* diterjemahkan oleh Saut Pasaribu, Rh. Widada dan Eka Adi Nugraha dengan judul *Teori Sosiologi Dari Klasik Sampai Perkembangan Terakhir Posmodern*. Ed-8. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Zahrawati, F. (2020). Pembebasan Jerat Feminisasi Kemiskinan. *AL MA'ARIEF: Jurnal Pendidikan Sosial dan Budaya*, 2(1), 9–16. <https://doi.org/10.35905/almaarief.v2i1.1327>